



## Intervensi Politik Dalam Dunia Manajemen Pendidikan Di Indonesia

Haris Monoarfa<sup>1</sup>, Henny N Tambingon<sup>2</sup>, Viktory N J Rotty<sup>3</sup>,

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Manajemen Pendidikan S3 Pascasarjana UNIMA

Email: [harismonoarfa85@gmail.com](mailto:harismonoarfa85@gmail.com)<sup>1</sup>, [hennytambingon@unima.ac.id](mailto:hennytambingon@unima.ac.id)<sup>2</sup>, [viktoryrotty@unima.ac.id](mailto:viktoryrotty@unima.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan generasi bangsa agar dapat menjadi warga Negara yang memiliki daya saing yang tinggi di era globalisasi. Pada dasarnya pendidikan bagi masyarakat Indonesia sangat penting karena pendidikan merupakan dasar untuk memanusiakan manusia, akan tetapi di Indonesia pendidikan mudah diintervensi oleh kekuasaan atau politik, kita bisa lihat dari setiap bergantian menteri pendidikan yang membuat sistem pendidikan berubah-ubah. Di Indonesia perubahan sistem pendidikan atau yang kita sebut kurikulum mengalami perubahan sebanyak 11 kali, mulai dari tahun 1947 sampai dengan sekarang, hal ini akan mengakibatkan masalah dalam pendidikan, karena perubahan kurikulum yang sering kali terjadi, tak hanya itu sistem pendidikan di Indonesia pun terbilang rendah, karena perhitungannya hanya menggunakan angka-angka. Intervensi politik dalam dunia pendidikan semakin menjadi-jadi dan berkembangbiak setelah masuknya era reformasi. Pada era ini pendidikan betul-betul telah dijadikan alat politik untuk mendulang suara demi mencapai kemenangan dan memenuhi hasrat politik. Intervensi politik dalam dunia pendidikan tidak selamanya bernilai negative, intervensi ini dapat pula bernilai positif apabila diintervensi oleh politisi-politisi yang memiliki idealisme yang tinggi tanpa memperhitungkan untung rugi baik bagi diri maupun kelompoknya. Namun sayang, politisi seperti ini jumlahnya masih relatif sedikit sehingga tidak terlihat pada permukaan.

**Kata Kunci:** *Politik. Pendidikan*

### Abstract

Education is an effort to educate the nation's generation so that they can become citizens who have high competitiveness in the era of globalization. Basically education for the Indonesian people is very important because education is the basis for humanizing humans, but in Indonesia education is easily intervened by power or politics, we can see from every turn of the minister of education that changes the education system. In Indonesia, the change in the education system or what we call the curriculum has changed 11 times, starting from 1947 until now, this will cause problems in education, because curriculum changes often occur, not only that the education system in Indonesia is also relatively low. , because the calculations only use numbers. Political intervention in the world of education has become increasingly widespread and multiplied after the entry of the reform era. In this era, education has really become a political tool to gain votes in order to achieve victory and fulfill political desires. Political intervention in the world of education is not always negative, this intervention can also be positive if it is intervened by politicians who have high ideals without taking into account the advantages and disadvantages for both themselves and their groups. But unfortunately, there are still relatively few politicians like this, so they are not visible on the surface.

**Keywords:** *Politics. Education*

## PENDAHULUAN

Intervensi politik dalam dunia pendidikan semakin menjadi-jadi dan berkembangbiak setelah masuknya era reformasi. Pada era ini pendidikan betul-betul telah dijadikan alat politik untuk mendulang suara demi mencapai kemenangan dan memenuhi hasrat politik. Intervensi politik dalam dunia pendidikan tidak selamanya bernilai negative, intervensi ini dapat pula bernilai positif apabila diintervensi oleh politisi-politisi yang memiliki idealism yang tinggi tanpa memperhitungkan untung rugi baik bagi diri maupun kelompoknya. Namun sayang, politisi seperti ini jumlahnya masih relatif sedikit sehingga tidak terlihat pada permukaan.

politik. Alhasil, peran pendidikan sebagai sarana mengubah generasi bangsa menjadi generasi intelektual malah berubah menjadi sarana mengisi kantong dan mempertinggi jabatan. Politik bisa dikatakan sebagai sebuah tombak tajam yang bisa membunuh cita-cita utama pendidikan yaitu mencerdaskan bangsa.

Banyak jabatan tinggi yang diperoleh oleh bagian dari instansi pendidikan seperti guru berasal dari koneksi dengan pemerintah daerah. Jabatan ini tidak diperoleh karena kompetensi yang dimilikinya. Contohnya jabatan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Jabatan ini dapat dengan mudah diperoleh jika orang yang mengisi kursi pemerintahan daerah adalah orang terdekat. Orang terdekat yang dimaksudkan bukan hanya keluarga atau sahabat, tetapi juga rekan politik. Rekan politik yang sudah dibantu jalannya untuk memasuki pemerintahan daerah akan melakukan sesuatu yang bisa disebut balas budi. Rekan politik ini akan mengangkat jabatan si guru yang mengkampanyekannya. Hal ini dapat mudah dilakukan oleh pemerintah daerah karena mereka memang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Pada Akhirnya, orang yang memiliki kemampuan yang lebih baik akan terabaikan dan tentunya hal ini akan menghambat perkembangan pendidikan.

Pendidikan di Indonesia sendiri begita banyak intervensi politiknya, bisa dilihat dari setiap pergantian menteri akan berganti pula kebijakannya, sehingga perubahan sistem pendidikan pun berubah khususnya kurikulum. Sangat jelas perngatina kurikulum yang terjadi pada pendidikan Indonesia tidak sampai satu dekade.

Malau dari awal orde baru dengan sistem kurikulum 1947 sampai dengang sekarang kurikulum 13 bahkan yang terbarunya adalah kurikulum merdeka, dengan adanya pergantian ini peserta didik tidak akan berkembang dari segi pemikiran yang kritis. Pergantian materi pembelajaran dalam setiap perubahan kurikulum tentunya memiliki dampak akan sikap kritis peserta didik. Refleksi kurikulum dari tahun-tahun sebelumnya tidak mampu membebaskan berpikir peserta didik.

Pergantian kurikulum tentunya akan membuat peserta didik bosan dalam menerima pembelajaran karena keterbatasan akan ruang gerak dan berpikir peserta didik. Kita lihat saja bagaimana proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Interaksi yang ditawarkan di dalamnya hanya berupa pemberian materi tanpa adanya timbal balik (respon) peserta didik.

Disiniah sistem pendidikan yang membosankan terbentuk karean adanya intevensi politik dari penguasa.

Selain itu kita juga dapat melihat bersama di kepemimpinannya Presiden Jokowi Dodo ketika memilih Nadiem Makarim sebagai menteri Pendidikannya, yang sistem pembelajaran di rubah dengan konsep Daring (dalam jaringan), kuliah hanya lima semester, dan penghapusan skripsi, hal ini dilakukan karena tujuannya untuk menghilangkan nalar kritis bagi peserta didik, selain itu sistem pendidikan di Indonesia, dengan aspek penilain yang di ukur dari nilai atau angka-angka mengakibatkan peserta didik

tidak akan berkembang dari segi karakter, karena peserta didik hanya akan terfokus untuk mengejar Nilai atau angka-angka, semakin tinggi nilainya maka semakin tinggi pula derajatnya di hadapan orang lain.

Sedangkan menurut Murtadha Muthahhari pendidikan terkait erat dengan fitra, kewajiban mencari ilmu, sains ( ilmu pengetahuan) dan agama hal ini merupakan satu sama lain yang saling melingkupi, karena pendidikan itu bicara persoalan perilaku atau akhlak seseorang atau lebih tepatnya bisa disebut sebagai “Memanusiakan Manusia”.

## **METODE**

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian *kualitatif deskriptif* yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau dengan kata lain penelitian yang lebih menonjolkan pada upaya pengolahan data dalam kata-kata bukan dalam angka-angka sebagaimana dalam penelitian kuantitatif. Artinya bahwa jenis penelitian ini hanya terbatas pada usaha mengungkapkan fakta suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya.

### **Teknik Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari banyak jurnal, dan buku-buku *literature* yang berkaitan dengan Intervensi Politik Dalam Dunia Manajemen Pendidikan Di Indonesia Salah satunya seperti Jurnal Yeni Rahmawati tentang “Intervensi Politik Terhadap Kebijakan Pendidikan Pasca Reformasi”

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Intervensi Politik Dalam Dunia Manajemen Pendidikan Di Indonesia.**

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Meskipun pendidikan dan politik berposisi sebagai dua elemen penting dalam sistem sosial politik, namun sering dikaji sebagai bagian-bagian yang terpisah. Tentu saja hal demikian tidak tepat karena pendidikan dan politik bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat sehingga membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di suatu negara. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan.

Menurut Islamy (1992: 10) gambaran jelas tentang keterkaitan antara pendidikan dan politik dapat kita telusuri di dunia Islam, dimana sejarah peradaban Islam banyak ditandai oleh kesungguhan para ulama dan umara dalam memperhatikan persoalan pendidikan sebagai upaya untuk memperkuat posisi sosial politik kelompok dan pengikutnya. Lebih lanjut Supandi dan Sanusi (1988: 80) tentang pendidikan pada masa Islam klasik dengan hasil kesimpulan dalam sejarah perkembangan Islam, Institusi politik ikut mewarnai corak pendidikan yang dikembangkan. Keterlibatan para penguasa dalam kegiatan pendidikan waktu itu, menurut Rasyid, tidak hanya sebatas dukungan moral kepada para peserta didik, melainkan juga dalam bidang administrasi, keuangan dan kurikulum (1994: 3). Dia menulis sebagai berikut:

Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan merupakan salah satu konstalasi politik. Peranan yang dimainkan oleh masjid-masjid dan madrasah madrasah dalam mengokohkan kekuasaan

politik para penguasa dapat dilihat dalam sejarah. Di lain pihak, ketergantungan pada uluran tangan para penguasa secara ekonomis, membuat lembaga-lembaga tersebut harus sejalan dengan nuansa politik yang berlaku.

Kutipan di atas menegaskan bahwa hubungan antara politik dan pendidikan di dalam tampak sedemikian erat. Perkembangan kegiatan-kegiatan kependidikan banyak dipengaruhi oleh para penguasa dan para penguasa memerlukan dukungan institusi-institusi pendidikan untuk membenarkan dan mempertahankan kekuasaan mereka. Hal ini dapat dipahami, karena tujuan pemerintahan Islam, Menurut Harman (1984) di dalam Islami (1992: 3), adalah “menegakkan kebenaran dan keadilan.

Di negara-negara Barat, kajian antara hubungan pendidikan dan politik dimulai oleh Plato dalam bukunya *Republic*. Walaupun utamanya membahas berbagai persoalan kenegaraan, buku tersebut juga membahas hubungan antara ideologi dan institusi negara dengan tujuan dan metode pendidikan. Berikut ini adalah kesan mendalam Allan Bloom (1987: 380) tentang *Republic*:

“For me (*Republic* is) the book on education, because it really explains to me what I experience as a man and a teacher, and I have almost always used it to point out what we should not hope for, as a teaching of moderation and resignation”

Plato mendemonstrasikan dalam buku tersebut bahwa dalam budaya Helenik, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Ia menjelaskan bahwa setiap budaya mempertahankan kontrol atas pendidikan di atas kelompok-kelompok elit yang secara terus menerus menguasai kekuasaan politik, ekonomi, agama dan pendidikan. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas kependidikan dan aktifitas politik. Keduanya seakan dua sisi dari satu koin, tidak mungkin terpisahkan. Walaupun sangat umum dan singkat, analisis Plato tersebut telah meletakkan fundamental bagi kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan ilmuwan generasi berikutnya

Dalam ungkapan Albernethy dan Coombe (1965: 287) di dalam M. Sirozi (2010: 7), education and politics are inextricably linked (pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dipisahkan). Menurut mereka (1965: 289), hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (*group attitude*), masalah pengangguran (*unemployment*), dan peranan politik kaum cendikia (*the political role of the intelligentsia*). Kesempatan dan prestasi pendidikan pada suatu kelompok masyarakat, menurut mereka, dapat memengaruhi akses kelompok tersebut dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Perbedaan signifikan antarberbagai kelompok masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pendidikan dapat dilihat pada distribusi kekuasaan politik dan ekonomi serta kesempatan kerja, khususnya pada sektor pelayanan publik. Di negara-negara pascakolonial kelompok masyarakat yang mendapat privilese pendidikan lebih mampu melakukan konsolidasi kekuatan, lalu muncul menjadi kelompok penguasa yang menguasai partai-partai politik dan sektor pelayanan publik. Privilese atau diskriminasi pendidikan bisa terjadi karena alasan-alasan budaya atau aga

### **Pendidikan menurut Murtadha Muthahhari**

Menurut Muthahhari sendiri, bahwa pendidikan terkait erat dengan fitrah. Hal itu pun akan terlihat sama dalam pandangan al-Ghazâlî, yang menurutnya pondasi pendidikan manusia adalah pada nilai-nilai Ilahiyah, yang disebut oleh al-Ghazâlî sebagai khulq (sebagai persamaan istilah dari fitrah).

Di tengah-tengah kajian tentang fitrah/khulq ini nantinya akan muncul beberapa cabang, antara lain masalah “pendidikan” dan “pengajaran”, suatu tema yang amat luas dan merentang panjang

Dari pendapat di atas, sangat jelas terlihat bahwa dimensi dasar pembentukan manusia melalui pendidikan adalah terletak pada fitrah manusia. Fitrah manusia adalah yang selalu membawa manusia untuk selalu condong kepada kebenaran dan membenci kejahatan, sebagaimana juga sifat pendidikan yang mengajarkan manusia kepada pencapaian kebenaran dan mencegah kejahatan.

Dengan demikian, tugas pendidikan yang utama adalah memberikan informasi kepada manusia mengenai kebenaran. Dan, dengan adanya fitrah dalam diri manusia, maka informasi itu berguna sebagai bekal dalam pencarian kebenarannya. Hal itu lebih disebabkan adanya sifat fitrah yang cinta kebenaran. Manusia, menurut Muthahhari, adalah makhluk pencari kebenaran.

Maka dari itu pendidikan tidak bisa diintervensi oleh politik, yang seharusnya pendidikan lah yang harus intervensi Politik, karena pendidikan akan mengajarkan kita tentang bagaimana “Memanusiakan manusia”, dengan kata lain lebih mengutamakan kemanusiaan ketimbang “kepentingan”.

Muthahhari menjelaskan secara luas mengenai kewajiban mencari ilmu. Shalat adalah satu kewajiban, puasa adalah salah satu kewajiban, zakat adalah salah satu kewajiban, haji adalah salah satu kewajiban, jihad adalah salah satu kewajiban, dan amar makruf nahi munkar adalah satu kewajiban. Demikian juga halnya berdasarkan hadits di atas dengan mencari ilmu, ia merupakan salah satu kewajiban. Pada sisi ini, secara umum, tidak ada perselisihan. Sejak masa permulaan Islam hingga hari ini seluruh kelompok dan seluruh ulama Islam sepakat dan menerima hal ini. Di dalam kitab-kitab hadits selalu ada satu bab khusus dengan judul “Bab Kewajiban Mencari Ilmu” atau judul-judul lain yang sejenis. Kalau pun ada perselisihan, itu hanya pada penjelasan dan penafsiran makna dan maksud hadits ini, dan sampai sejauh mana cakupan hadits ini.

Akal manusia karena merupakan alat untuk memperoleh ilmu. Sebagaimana Muthahhari, maka al-Ghazâlî pun memberikan tempat yang terhormat baginya. Akal ia jadikan sebagai objek kajian khusus, sebagaimana ia lakukan terhadap tabiat dan kekuatan bawaan manusia. Menurutnya, puncak kesempurnaan manusia ialah terseimbangnya peran akal dan hati dalam membina ruh manusia. Jadi sasaran inti dari pendidikan adalah kesempurnaan akhlak manusia, dengan membina ruhnya.

Muthahhari menyebutkan bahwa akal dan ilmu merupakan saudara kembar. Kembarnya akal dan ilmu adalah suatu keniscayaan dan merupakan perkara yang sangat penting. Orang yang memiliki kemampuan berpikir tetapi informasi ilmu yang dimilikinya sangat sedikit dan lemah, ibarat sebuah pabrik yang tidak memiliki bahan baku yang akan diolah atau bahan bakunya sangat sedikit, sehingga produksinya akan sangat sedikit pula. Karena, banyaknya produksi tergantung banyaknya bahan baku yang diolah. Sebaliknya, pabrik yang memiliki banyak bahan baku tetapi mesin pengolahnya tidak difungsikan, maka pabrik itu akan lumpuh tak berproduksi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa Politik dan Pendidikan dua hal dengan esensi yang berbeda, walaupun berbeda secara esensi, akan tetapi masih memiliki hubungan yang bisa menyatu, seperti halnya pendidik yang harus mengintervensi Politik bukan sebaliknya, karena Pendidikan bertujuan untuk mengajarkan “Memanusiakan Manusia”

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ifah Nabilah Zahidah Konsep Pendidikan Menurut Murtadha Muthahhari : Jakarta 2014

Kaelan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, buku paduan bagi mahasiswa (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.10.

Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 36.

Yeni Rahmawati Intervensi Politik Terhadap Kebijakan Pendidikan Pasca Reformasi Vol. Iv No. 2 Thn 2016

Winda sari, "Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pepustakaan" *Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan*, Volume 1 Nomor 1, edisi September 2012, hal. 41